



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KAJIAN HUKUM PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER  
PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) TERHADAP PESERTA  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DI RUMAH  
SAKIT PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Program Studi  
Hukum Program Sarjana

**Disusun Oleh :**

**Fitri Kartika  
231003742010406**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

KAJIAN HUKUM PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER PENANGGUNG JAWAB  
PELAYANAN (DPJP) TERHADAP PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS (PPDS) DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
Fitri Kartika  
231003742010406

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

Dr. Hadi Karyono, S.H., M.Hum  
NIDN : 06020767401

Anggota,

Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H., M.Hum  
NIDN : 0605106301

Anggota,

Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si  
NIDN : 0613086201

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN .....	IV
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK.....	XII
<i>ABSTRACT</i> .....	XIII
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. PEMBATAAN MASALAH .....	7
C. PERUMUSAN MASALAH.....	8
D. TUJUAN PENELITIAN .....	8
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
F. SISTIMATIKA PENULISAN SKRIPSI .....	11
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Pelimpahan Wewenang .....	14
A.1. Konsep Pelimpahan Wewenang .....	14
A.2. Kajian Hukum Pelimpahan Wewenang.....	18
A.3. Regulasi Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan .....	22
A.4. Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) kepada Dokter Peserta PPDS .....	27
B. Tinjauan Khusus Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	28
B.1. Konsep Tanggung Jawab Hukum .....	28
B.2. Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum.....	30
C. Tinjauan Khusus Dokter .....	40
C.1. Pengertian Dokter, PPDS dan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).....	40

C.2. Surat Ijin Praktik dan Kompetensi Dokter PPDS .....	46
C.3. Batasan Dokter PPDS Mengambil Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya .....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Metode Pendekatan .....	56
B. Spesifikasi Penelitian.....	57
C. Sumber Data .....	57
D. Metode Pengumpulan Data .....	59
E. Metode Penyajian Data .....	60
F. Metode Analisa Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	61
A. Pengaturan Pelimpahan Wewenang DPJP terhadap PPDS di Rumah Sakit Pendidikan Di Indonesia .....	61
B. Tanggung Tanggung Jawab Hukum DPJP dan PPDS dalam Kasus Kesalahan Medis Yang Terjadi Akibat Pelimpahan Wewenang Di Rumah Sakit Pendidikan .....	72
C. Implikasi Hukum Dan Etika Dari Pelimpahan Wewenang DPJP kepada PPDS Dalam Praktik Klinis Di Rumah Sakit Pendidikan .....	79
BAB V PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN .....	86
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89

## **ABSTRAK**

Pelimpahan wewenang dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) kepada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit pendidikan merupakan aspek penting dalam praktik dan pendidikan kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum, tanggung jawab, dan implikasi etika dari proses pelimpahan wewenang di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur pelimpahan wewenang medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang diatur secara ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar profesional dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini menyoroti keterkaitan tanggung jawab hukum antara DPJP dan PPDS, terutama dalam kasus kesalahan medis akibat tugas yang dilimpahkan. Pertimbangan etika juga sangat penting, dengan penekanan pada pentingnya pengawasan, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap etika kedokteran dalam proses pelimpahan. Rekomendasi meliputi penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan pengawasan, dan peningkatan komunikasi antara DPJP dan PPDS untuk meminimalkan risiko dan memastikan praktik pelimpahan yang aman dan efektif.

**Kata Kunci :** Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, Pelimpahan Wewenang, Program Pendidikan Dokter Spesialis.

## **ABSTRACT**

*The task shifting from Supervising Doctor (DPJP) to Resident Doctors (PPDS) in educational hospitals is a critical aspect of medical practice and education. This research aims to explore the legal framework, responsibilities, and ethical implications of this delegation process in Indonesian educational hospitals. Using a normative juridical approach, this study analyzes the current regulations, including Law No. 17 of 2023 and Government Regulation No. 28 of 2024, which govern the delegation of medical authority. The findings reveal that task shifting is tightly regulated to ensure that it is conducted in accordance with professional standards and that patient rights are protected. The study highlights the intertwined legal responsibilities of DPJP and PPDS, especially in cases of medical errors resulting from delegated tasks. Ethical considerations are also crucial, with the study emphasizing the importance of supervision, documentation, and adherence to medical ethics in the delegation process. Recommendations include strengthening Standard Operating Procedures (SOPs), enhancing supervision, and improving communication between DPJP and PPDS to minimize risks and ensure safe and effective delegation practices.*

**Keywords:** *Resident Doctors, Supervising Doctor, Task Shifting.*